



COMPLIANCE ADVISOR OMBUDSMAN

LAPORAN PENILAIAN

Penilaian Kepatuhan CAO

C-I-R5-714-F199

26 Juni 2014

Investasi IFC di Delta Wilmar

Kasus

Wilmar-3 / Jambi

Rangkuman

Wilmar Group adalah sebuah konglomerat agrobisnis yang mengkhususkan diri di bidang produksi dan perdagangan minyak kelapa sawit. Sejak tahun 2003, IFC telah menanam empat investasi di Wilmar Group.

CAO menerima aduan Wilmar-3 di bulan November 2011. Aduan Wilmar-3 menduga bahwa PT Asiatic Persada (PTAP) telah mengembangkan perkebunan kelapa sawit pada lahan di bawah kepemilikan adat masyarakat pribumi di Provinsi Jambi, Indonesia. PTAP adalah anak perusahaan Wilmar hingga Maret 2013. Aduan Wilmar-3 juga mengangkat masalah yang lebih luas terkait dengan rantai pasok Wilmar di Indonesia.

CAO merampungkan audit terhadap investasi IFC di Wilmar di bulan Juni 2009. Laporan audit CAO 2009 mendapati sejumlah temuan ketidakpatuhan. Temuan ini antara lain bahwa IFC tidak menangani risiko rantai pasok minyak kelapa sawit di seputar investasinya sesuai dengan persyaratan lingkungan dan sosialnya (E&S).

Wilmar-3 adalah aduan ketiga kepada CAO terkait dengan investasi IFC di Wilmar Group. Aduan pertama diajukan di tahun 2007 dan mengantar ke audit 2009. Aduan kedua diajukan di tahun 2008 dan ditutup oleh CAO di tahun 2012 setelah penyelesaian sebagian masalahnya. Dalam konteks mandat kepatuhan CAO, semua aduan ini menaikkan secara substantif persoalan yang serupa. Akibatnya, penilaian kepatuhan ini berfokus pada kinerja IFC sehubungan dengan investasinya di masa setelah Audit Wilmar-1 CAO (yakni, pasca-Juni 2009).

Setelah meninjau dokumentasi yang tersedia, tidak jelas bagi CAO apakah IFC mengawasi investasinya di Delta-Wilmar sesuai dengan persyaratan E&S. Khususnya, dan terkait dengan masalah yang diangkat oleh aduan itu, tidak jelas bagi CAO apakah IFC meyakinkan dirinya secara memadai bahwa syarat pencairan E&S untuk pinjamannya kepada Delta-Wilmar terpenuhi sebelum pencairan di bulan Januari 2010. Dengan mengingat kerja kasus baru-baru ini, CAO juga menemukan bahwa pertanyaan seputar pencairan dan pengawasan yang diangkat oleh penilaian ini bermakna penting yang sistemis bagi IFC. Maka, CAO akan mengembangkan Kerangka Acuan Kerja untuk penyelidikan kepatuhan pengawasan IFC terhadap investasi Wilmarnya di masa setelah audit Juni 2009.

Isi

1. Ikhtisar Proses Penilaian Kepatuhan CAO
2. Latar Belakang
3. Ruang Lingkup Penilaian Kepatuhan
4. Diskusi CAO
5. Keputusan CAO

Tentang CAO

Misi CAO adalah melayani sebagai sebuah mekanisme bantuan independen yang adil, terpercaya, dan efektif dan meningkatkan akuntabilitas lingkungan dan sosial IFC dan MIGA.

CAO (Kantor Ombudsman Penasihat Kepatuhan) adalah sebuah jabatan independen yang melapor langsung kepada Presiden Grup Bank Dunia. CAO meninjau pengaduan dari masyarakat yang terdampak oleh proyek pembangunan yang dijalankan oleh dua lengan peminjaman sektor swasta Grup Bank Dunia: International Finance Corporation (IFC) dan Multilateral Investment Guarantee Agency (MIGA).

Untuk informasi lebih lanjut tentang CAO, kunjungi www.cao-ombudsman.org

Kantor Penasihat Kepatuhan (CAO) untuk
International Finance Corporation (IFC) dan
Multilateral Investment Guarantee Agency (MIGA)
Anggota Grup Bank Dunia

1. Ikhtisar Proses Penilaian Kepatuhan CAO

Ketika CAO menerima aduan tentang sebuah proyek IFC atau MIGA, aduan itu dirujuk untuk penilaian. Jika CAO menyimpulkan bahwa para pihak tidak mau atau mampu mencapai solusi berfasilitasi, kasus dialihkan ke Kepatuhan CAO untuk penilaian dan penyelidikan kepatuhan potensial.

Sebuah penilaian kepatuhan juga bisa dipicu oleh Wakil Presiden CAO, manajemen IFC/MIGA, atau Presiden Grup Bank Dunia.

Fokus fungsi Kepatuhan CAO adalah kinerja IFC dan MIGA, bukan kliennya. CAO mengkaji cara IFC/MIGA meyakinkan diri tentang kinerja kegiatan atau nasihat usahanya, serta apakah hasil kegiatan atau nasihat usaha itu konsisten dengan niat dari ketentuan kebijakan yang terkait. Namun, sering kali, dalam mengkaji kinerja proyek dan penerapan langkah IFC/MIGA untuk memenuhi persyaratan yang terkait, perlu bagi CAO untuk meninjau tindakan klien dan memverifikasikan hasil di lapangan.

Guna memutuskan apakah suatu penyelidikan kepatuhan layak dilakukan, Kepatuhan CAO melakukan lebih dahulu sebuah penilaian kepatuhan. Maksud proses penilaian kepatuhan adalah untuk memastikan bahwa penyelidikan kepatuhan dimulai hanya untuk proyek yang mengangkat keprihatinan yang cukup besar mengenai hasil lingkungan dan/atau sosial, dan/atau persoalan bermakna penting secara sistemis lainnya bagi IFC/MIGA.

Untuk memandu proses penilaian kepatuhan, CAO menerapkan beberapa kriteria. Kriteria ini menguji nilai dari dijalankannya penyelidikan kepatuhan. Maka, sebagai bagian dari proses penilaian, CAO mempertimbangkan apakah:

- Ada bukti potensi hasil lingkungan dan/atau sosial yang sangat buruk saat ini, atau di masa mendatang.
- Ada petunjuk bahwa kebijakan atau kriteria penilaian lainnya mungkin tidak ditaati atau diterapkan dengan benar oleh IFC/MIGA.
- Ada bukti yang menunjukkan bahwa ketentuan IFC/MIGA, baik dipatuhi maupun tidak, telah gagal memberikan tingkat perlindungan yang memadai.

Dalam melakukan penilaian, CAO akan melibatkan tim IFC/MIGA yang mengerjakan proyek dan pemangku kepentingan lainnya untuk memahami kriteria yang digunakan IFC/MIGA untuk meyakinkan diri akan kinerja proyek, cara IFC/MIGA meyakinkan diri akan kepatuhan terhadap kriteria ini, cara IFC/MIGA meyakinkan diri bahwa semua ketentuan ini memberikan tingkat perlindungan yang memadai, dan, secara umum, apakah suatu penyelidikan kepatuhan adalah tanggapan yang tepat. Setelah selesainya suatu penilaian kepatuhan, CAO dapat menutup kasus atau memulai suatu penyelidikan kepatuhan IFC/MIGA.

Setelah CAO menyimpulkan suatu penilaian kepatuhan, CAO akan memberi tahu IFC/MIGA, Presiden Grup Bank Dunia, dan Dewan Pengurus IFC/MIGA secara tertulis. Jika penilaian kepatuhan dihasilkan dari sebuah pengaduan, pengaju aduan akan juga diberi tahu tentang hasilnya. Laporan penilaian akan dipublikasikan di situs web CAO.

Jika CAO memutuskan untuk memulai suatu penyelidikan kepatuhan sebagai hasil penilaian kepatuhan, CAO akan menyusun kerangka acuan kerja untuk penyelidikan kepatuhan sesuai dengan Pedoman Operasional CAO.

2. Latar Belakang

Investasi

Wilmar Group adalah sebuah konglomerat agrobisnis yang mengkhususkan diri di bidang produksi dan perdagangan minyak kelapa sawit dan beroperasi di Asia, Eropa Timur, dan Afrika.

Sejak tahun 2003, IFC telah melakukan empat investasi di Wilmar Group: Wilmar Trading (IFC No. 20348); Delta-Wilmar CIS (IFC No. 24644); Wilmar WCap (IFC No. 25532); dan Delta-Wilmar CIS Expansion (IFC No. 26271).

Uraian singkat masing-masing investasi adalah sebagai berikut.

Wilmar Trading - Indonesia (2004) - No. Proyek IFC 20348

Investasi IFC: Garansi hingga \$33,3 juta untuk fasilitas pembiayaan pra-pengapalan.

Kerangka waktu:

- Tinjauan Komite Investasi Korporat (CIC) IFC: Agustus 2003.
- Rapat Peninjauan Investasi: November 2003.
- Persetujuan Dewan: Mei 2004.
- Komitmen: Juni 2004.
- Pencairan: November 2005.
- Penutupan: Januari 2007.

Uraian Proyek IFC: Wilmar Trading adalah lengan pemasaran dan perdagangan dari Wilmar Holdings. Dukungan IFC akan memfasilitasi Wilmar Trading untuk mendanai program ekspor tahun 2003/2005-nya dan memungkinkan pertumbuhan jangka panjang berlanjut di sektor yang di dalamnya Indonesia memiliki keunggulan komparatif yang kuat. Proyek ini memungkinkan Wilmar Trading menaikkan skala pengambilan minyak kelapa sawit mentah (CPO) dari perkebunan di Indonesia dan mengolahnya menjadi minyak sulingan. Ditinjau menurut Prosedur Peninjauan Lingkungan dan Sosial 1998 serta Kebijakan Perlindungan 1998.

Delta Wilmar CIS - Ukraine (2006) - No. Proyek IFC 24644

Investasi IFC: Pinjaman - US\$17,5 juta.

Kerangka waktu:

- Peninjauan CIC: Februari 2006.
- Rapat Peninjauan Investasi: Juni 2006.
- Persetujuan Dewan: Juni 2006.
- Komitmen: Juli 2006.
- Pencairan: Oktober 2006, Januari 2010.
- Penutupan: November 2012.

Uraian Proyek IFC: Delta-Wilmar CIS akan membangun, memperlengkapi, dan memulai operasi penyulingan CPO berkapasitas 1.500 metrik ton per hari di Ukraina. Ditinjau menurut Prosedur Peninjauan Lingkungan dan Sosial 1998 serta Kebijakan Perlindungan 1998.

Wilmar Working Capital - Indonesia (2006) - Nomor Proyek IFC 25532

Investasi IFC: Garansi hingga \$50 juta untuk fasilitas pembiayaan pra-pengapalan.

Kerangka waktu:

- Peninjauan CIC: Oktober 2006.
- Rapat Peninjauan Investasi: November 2006.
- Persetujuan Dewan: Desember 2006.
- Komitmen: Februari 2007.
- Pencairan: Maret 2007.
- Penutupan: Juni 2009.

Uraian Proyek IFC: Proyek ini memungkinkan Wilmar Trading memenuhi kebutuhan modal kerja untuk membeli minyak kelapa sawit mentah (CPO) dari perkebunan kelapa sawit di Indonesia dan mengolahnya menjadi minyak sulingan untuk ekspor. Dukungan IFC adalah penting untuk membuat perusahaan bisa membiayai program ekspornya dan memungkinkan pertumbuhan jangka panjang berlanjut di sektor yang di dalamnya Indonesia mempunyai keunggulan komparatif yang kuat. Terlihat sebagai gambaran dukungan IFC terhadap sponsor yang baik di sektor yang peka secara sosial. Proyek ini akan memastikan operasi tanpa putus rantai pasok CPO dan pelestarian semua kepentingan ekonomi dan pemekerjaan yang terkait dengan rantai itu seperti perkebunan, pengangkutan, penyimpanan, pengolahan, dan pengapalan. Ditinjau menurut Prosedur Peninjauan Lingkungan dan Sosial 2006 serta Standar Kinerja IFC 2006.

Delta Wilmar CIS Expansion - Ukraine (2008) - No. Proyek IFC 26271

Investasi IFC: Pinjaman - US\$45 juta.

Kerangka waktu:

- Peninjauan CIC: Juni 2008.
- Rapat Peninjauan Investasi: Agustus 2008.
- Persetujuan Dewan: Oktober 2008.
- Komitmen: November 2008.
- Pencairan: Januari 2010.
- Penutupan: Juli 2013.

Uraian Proyek IFC: Delta-Wilmar CIS, sebuah penyulingan minyak kelapa sawit dan produsen mentega putih serta klien aktif IFC di Ukraina, akan menaikkan kapasitas dan berinvestasi di infrastruktur terkait dekat Pelabuhan Yuzhny di Kawasan Odessa. Ditinjau menurut Prosedur Peninjauan Lingkungan dan Sosial 2007 serta Standar Kinerja IFC 2007.

Audit CAO terhadap Investasi IFC di Wilmar

CAO merampungkan audit terhadap investasi IFC di Wilmar di bulan Juni 2009.

Temuan utama disajikan di Ringkasan Eksekutif laporan audit Wilmar-1 sebagai berikut:

Sehubungan dengan investasinya di Wilmar Group, IFC menerapkan pendekatan minimal terhadap pengkajian rantai pasok tiap proyek. Untuk tiap investasi, tekanan komersial dibiarkan mendominasi dan memengaruhi secara berlebihan pengategorian serta ruang lingkup dan skala uji tuntas lingkungan dan sosial. Akibatnya, mandat dan misi pembangunan IFC tidak terwakili secara kuat di dalam proses pengambilan keputusan. Hal ini berefek mengucilkan IFC dari informasi utama mengenai cara tiap proyek akan memengaruhi rantai pasok minyak kelapa sawit. Karena tekanan komersial mendominasi proses pengkajian IFC, hasilnya adalah bahwa peninjauan uji tuntas lingkungan dan sosial tidak berlangsung seperti yang disyaratkan (h. 2).

Karena itu, CAO menyimpulkan bahwa IFC tidak memenuhi niat atau persyaratan Standar Kinerjanya sendiri untuk pengkajian investasinya pada fasilitas pembiayaan perdagangan Wilmar. Asumsi yang salah dibuat tentang dampak jenis tertentu produk keuangan (fasilitas pembiayaan perdagangan) tanpa pertimbangan yang layak terhadap sektor dan konteks negara investasi itu. Mengenai investasi penyulingan Wilmar, IFC lalai mengkaji rantai pasok perkebunan atau perusahaan dan pemasok lain yang terkait melalui Wilmar Group, seperti yang disyaratkan oleh Standar Kinerjanya (h. 2-3).

CAO menyimpulkan bahwa diambilnya penafsiran sempit tentang dampak investasi—sementara mengetahui penuh implikasi lebih luasnya—tidak konsisten dengan peran yang diyakini IFC, mandat pengurangan kemiskinan dan peningkatan kehidupan, dan komitmen terhadap pembangunan berkelanjutan (h. 3).

Yang relevan secara khusus dengan penilaian ini adalah CAO mencatat temuan berikut dari laporan audit tahun 2009-nya:

Standar Kinerja IFC (2006) menyatakan bahwa dampak buruk yang terkait dengan *rantai pasok* harus dipertimbangkan bila tenaga kerja murah menjadi satu faktor, atau bila sumber daya yang digunakan peka secara ekologi (h. 25) [penekanan ditambahkan].

CAO menemukan bahwa dampak pada tenaga kerja murah dan sumber daya yang peka secara ekologi terkait langsung dengan sektor minyak kelapa sawit (h. 25).

Fokus IFC tentang apakah CPO bisa dilacak kembali ke perkebunan milik Wilmar tidak konsisten dengan Standar Kinerja IFC, yang mensyaratkan pengkajian pemasok dan rantai pasok yang lebih luas (h. 27).

CAO menemukan bahwa ketidakmampuan yang dinyatakan IFC untuk melacak CPO ke area perkebunan tertentu di Indonesia adalah salah dan karena itu bukan pendapat absah untuk mengecualikan rantai pasok dengan keprihatinan sosial dan lingkungan yang terdokumentasikan dengan baik (h. 24).

IFC gagal untuk mengkaji dengan benar rantai pasok yang terkait dengan investasinya di Delta-Wilmar Expansion, sehingga membatasi ruang lingkup pengkajian IFC terhadap dampak lingkungan dan sosial dari investasi (h. 27).

CAO menyimpulkan bahwa pengkajian IFC terhadap Delta Wilmar CIS Expansion (No. Proyek IFC 26271) *lalai memperhitungkan rantai pasok perkebunan serta perusahaan dan pemasok lain yang terkait dengan Wilmar Group, seperti yang disyaratkan di dalam Standar Kinerja*. Hal ini menyebabkan ruang lingkup uji tuntas IFC yang terlalu sempit dan terbatas, yang pada gilirannya gagal memicu pengkajian Standar Kinerja yang berlaku (h. 29) [penekanan ditambahkan].

Tanggapan IFC terhadap Audit CAO

Dalam tanggapan 4 Agustus 2009-nya terhadap audit CAO, IFC menekankan bahwa pengelolaan lingkungan dan sosial (E&S) di dalam rantai pasok adalah kunci bagi upaya mengkaji dan mengurangi atau menghilangkan dampak buruk pada lingkungan, pekerja, dan masyarakat. Secara lebih khusus, IFC mengakui bahwa masalah rantai pasok seharusnya menerima pengawasan lebih ketat sebagai bagian dari investasi Delta-Wilmarnya dan berjanji untuk memberikan penekanan baru pada masalah pengelolaan rantai pasok di masa mendatang. Di dalam konteks ini, IFC mencatat bahwa: "Wilmar kini bisa lebih melacak minyak kelapa sawit dari perkebunannya sendiri hingga fasilitas pengolahannya..." (h. 6).

Pada 28 Agustus 2009, Presiden Grup Bank Dunia Robert Zoellick menulis kepada pengaju aduan Wimar-1 dengan mengatakan bahwa beliau telah mengarahkan manajemen IFC untuk mengambil semua langkah yang perlu guna memastikan bahwa masalah yang ditandai di dalam audit CAO tidak terulang. Terkait dengan itu, Tuan Zoellick juga menyatakan saat itu bahwa IFC akan:

- a. Tidak menyetujui proyek minyak kelapa sawit baru hingga IFC telah mengembangkan strategi untuk memastikan bahwa proyek akan dilakukan dengan cara yang berlanjut secara lingkungan dan sosial.¹
- b. Meninjau kinerja E&S semua investasi portofolio di bidang minyak kelapa sawit.
- c. Meningkatkan keterlibatan IFC dengan Meja Bundar Minyak Kelapa Sawit Berlanjut sebagai sarana mempromosikan kinerja E&S yang ditingkatkan di seluruh industri.
- d. Mengembangkan dan menerapkan sebuah program pelayanan penasihat yang menyoal sektor minyak kelapa sawit di Indonesia.
- e. Apabila disetujui oleh Wilmar, memasukkan masalah di seputar dampak perkebunan Indonesiannya ke dalam pengawasannya terhadap investasi Delta-Wilmar yang berjalan.

Aduan Wilmar-3

Pada 9 November 2011, penanda tangan dari kelompok masyarakat serta LSM lokal dan internasional, yang dipimpin oleh Forest Peoples Programme (FPP), mengajukan pengaduan Wilmar-3 kepada CAO. Aduan menuturkan utamanya sengketa lahan antara masyarakat setempat di Provinsi Jambi, Indonesia dan PT Asiatic Persada (PTAP). PTAP memiliki dan mengoperasikan perkebunan minyak kelapa sawit serta merupakan anak perusahaan Wilmar hingga Maret 2013.² Pengaju aduan menduga bahwa perusahaan menggerakkan kekuatan pemerintah untuk membongkar pemukiman di lahan sengketa. Selain sengketa Jambi, pengaju aduan menduga bahwa sengketa lahan yang tidak terselesaikan adalah sebuah masalah yang terkait dengan anak-anak perusahaan Wilmar di Indonesia secara lebih umum. Akibatnya, pengaju aduan meminta agar CAO melakukan peninjauan terhadap operasi Wilmar karena terkait dengan pembebasan lahan dan penyelesaian sengketa secara lebih umum.

Aduan menyebut secara khusus bahwa investasi Delta Wilmar 2008 IFC (No. 26271) yang diyakininya berkontribusi, melalui rantai pasoknya, pada perluasan perkebunan kelapa sawit yang dimiliki oleh anak-anak perusahaan Wilmar di Indonesia.

Wilmar-3 adalah aduan ketiga kepada CAO yang disiapkan oleh FPP terkait dengan investasi IFC pada Wilmar Group. Aduan pertama (Wilmar-1) diajukan pada 18 Juli 2007, dan menjadi subjek Audit Kepatuhan CAO bertanggal 19 Juni 2009. Aduan kedua (Wilmar-2) diajukan pada 19 Desember 2008 dan ditutup oleh CAO di bulan Juni 2012 setelah penyelesaian sebagian masalahnya. Aduan Wilmar-3 mengangkat masalah antara masyarakat dan PTAP yang tidak terselesaikan di dalam proses penyelesaian sengketa Wilmar-2 oleh CAO. Wilmar-3 dialihkan ke tim Kepatuhan CAO dari tim Penyelesaian Sengketa CAO di bulan Desember 2013 setelah penarikan diri PTAP dari proses penyelesaian sengketa CAO di akhir September 2013.³

¹ Penangguhan ini dicabut di bulan April 2011 setelah persetujuan Kerangka Kerja Grup Bank Dunia dan Strategi IFC untuk Keterlibatan di Sektor Minyak Kelapa Sawit (Strategi Minyak Kelapa Sawit). Tersedia di: <http://goo.gl/P04rb4>

² LSM baru-baru ini mengangkat keprihatinan tentang penjualan PTAP oleh Wilmar di bulan Maret 2013, dengan berpendapat bahwa IFC memiliki tanggung jawab berjalan atas sengketa Jambi. Lihat surat LSM ke IFC (Juli 2013). Tersedia di: <http://goo.gl/DtMQnM>

³ CAO, Laporan Simpul Penyelesaian Sengketa - Wilmar-3, Desember 2013, h. 1. Untuk rincian lebih lanjut tentang tiga aduan Wilmar, lihat Aneks 1: Ikhtisar aduan Wilmar CAO.

3. Ruang Lingkup Penilaian Kepatuhan

Dalam kasus-kasus yang dirujuk ke Kepatuhan setelah pengkajian, ruang lingkup penilaian dibatasi oleh masalah yang diangkat di dalam aduan dan ditandai selama tahap pengkajian CAO.

Sebagai bagian dari proses Wilmar-1, CAO telah sebelumnya mengaudit kinerja IFC sehubungan dengan masing-masing dari empat investasi Wilmar yang tercantum di atas. Laporan audit ini (bertanggal 19 Juni 2009) berisi analisis terinci keterlibatan IFC di proyek-proyek Wilmar hingga tanggal itu.⁴

Seperti diringkas di atas, tiap aduan Wilmar berkaitan dengan dampak lingkungan dan sosial dari perkebunan yang dimiliki oleh anak perusahaan Wilmar pada masyarakat setempat di Indonesia. Dalam konteks mandat kepatuhan CAO (yang berfokus pada kinerja E&S IFC), semua aduan ini dianggap mengangkat masalah yang serupa secara substantif.

Karena itu, penilaian kepatuhan ini berfokus pada kinerja E&S IFC sehubungan dengan investasinya di masa setelah audit Wilmar-1 (yakni, pasca-Juni 2009).

4. Diskusi CAO

Karena alasan yang tercatat di atas, penilaian ini berfokus pada pengawasan IFC terhadap proyek Wilmar pasca-Juni 2009. Pada saat ini, dua dari empat investasi Wilmar tetap aktif. Keduanya adalah Delta Wilmar CIS - Ukraine (2006) - No. Proyek IFC 24644 dan Delta Wilmar CIS Expansion - Ukraine (2008) - No. Proyek IFC 26271.

Pencairan Pasca-Juni 2009

IFC memproses pencairan sebesar US\$47,5 juta kepada Delta Wilmar di bulan Januari 2010. Pencairan ini meliputi US\$2,5 juta untuk Delta Wilmar CIS dan US\$45 juta untuk Delta Wilmar CIS Expansion.

Menurut Prosedur Peninjauan Lingkungan dan Sosial (ESRP) yang ada saat pencairan (v.4, 2009), peran IFC di dalam pengawasan proyek mencakup "memastikan bahwa setiap syarat pencairan (COD) E&S dipenuhi oleh klien sebelum pencairan."⁵ Persyaratan ini dirinci sebagai berikut:

Setelah perjanjian hukum ditandatangani dan bilamana ada COD E&S yang harus diselesaikan sebelum pencairan tertentu, dapatkan informasi yang dibutuhkan dari Pemimpin Transaksi untuk menentukan status pemenuhannya. Beri tahu Pemimpin Transaksi jika ada COD E&S yang tidak dipatuhi. Pengesampingan COD E&S harus disetujui oleh CESI Manajer dan terdokumentasikan di dalam ESRD.⁶

Tanggung jawab utama untuk persetujuan COD lingkungan dan sosial diembankan kepada spesialis utama lingkungan dan sosial yang bekerja di proyek.⁷

Perjanjian pinjaman IFC dengan Delta Wilmar (No. Proyek 24644 dan 26271) berisi COD yang diturunkan dari templat IFC standar. Templat ini mencakup COD lingkungan dan sosial yang mengait balik ke persyaratan Kebijakan Perlindungan 1998 (untuk No. Proyek 24644) dan Standar Kinerja 2006 (untuk No. Proyek 26271).

⁴ CAO (2009) *Audit CAO terhadap investasi IFC di Wilmar*. Tersedia di <http://goo.gl/AdkEBy>

⁵ IFC - ESRP v.4, alinea 6.2.1.

⁶ *Ibid.*, alinea. 6.2.2.

⁷ *Ibid.*, alinea 6.2.3.

Dokumentasi yang disiapkan oleh IFC saat pemrosesan pencairan Wilmar di bulan Januari 2010 menunjukkan bahwa IFC memandang bahwa COD, yang mencakup COD lingkungan dan sosial untuk tiap pinjaman, dipenuhi sehingga pencairan diperlukan.

Namun, setelah peninjauan dokumentasi dan diskusi proyek dengan staf IFC terkait, tidak jelas bagi CAO apakah IFC meyakinkan dirinya secara memadai bahwa Delta-Wilmar memenuhi COD lingkungan dan sosial sebelum pencairan pinjamannya di bulan Januari 2010. Hal ini khususnya menjadi persoalan sehubungan dengan perjanjian pinjaman untuk No. Proyek 26271 yang memasukkan Standar Kinerja 2006 IFC dengan persyaratan pengawas untuk memastikan analisis dan manajemen terhadap risiko yang muncul dari rantai pasok perusahaan.⁸

Pengawasan Umum

IFC diwajibkan untuk memantau kinerja E&S klien sepanjang usia investasi. Pengawasan proyek dilakukan atas dasar laporan pemantauan tahunan (AMR) yang diserahkan oleh klien dan kunjungan pengawasan lapangan. Seperti yang tercantum di ESRP, "maksud pengawasan E&S adalah mengembangkan dan mempertahankan informasi yang diperlukan untuk mengkaji status kepatuhan terhadap Standar Kinerja serta Rencana Aksi Lingkungan dan Sosial."⁹

Jika klien gagal mematuhi komitmen E&S-nya, pendekatan IFC adalah bekerja bersama klien untuk memulihkan kepatuhan itu hingga sejauh yang layak dan "jika klien gagal memulihkan kepatuhan, menjalankan pemulihan hak bilamana perlu."¹⁰

Dalam mempertimbangkan pendekatan IFC terhadap pengawasan investasi Delta-Wilmar di masa pasca-Juni 2009, CAO telah meninjau dokumentasi pengawasan IFC dan berbicara dengan anggota tim IFC yang bertanggung jawab atas proyek ini. Sebuah pemaparan analisis rantai pasok E&S Delta-Wilmar atau pendekatannya terhadap pengelolaan risiko E&S yang muncul dari rantai pasok minyak kelapa sawitnya tidak ada di dalam AMR yang diserahkan kepada IFC oleh Delta-Wilmar. CAO mencatat ketiadaan serupa tentang diskusi persyaratan pengelolaan rantai pasok menurut Standar Kinerja di dalam peninjauan AMR oleh IFC.

Pada saat yang sama, CAO memahami bahwa IFC telah sejak tahun 2009 mengambil sejumlah langkah untuk meningkatkan keterlibatannya di seputar masalah E&S di sektor minyak kelapa sawit. Ini tercantum di dalam sebuah Laporan Status tentang implementasi Strategi Minyak Kelapa Sawit 2011. Sebagai bagian dari proses ini, IFC telah mempromosikan penggunaan kode praktik keberlanjutan melalui Meja Bundar Minyak Kelapa Sawit Berkelanjutan. Secara khusus di Indonesia, IFC telah menerapkan prakarsa penasihat tentang model berbagi manfaat dengan masyarakat dan pertanian skala kecil untuk kelapa sawit.¹¹ Sehubungan dengan Wilmar, IFC mendukung sebuah studi terhadap enam perkebunan kelapa sawit di Indonesia berdasarkan Standar Kinerja yang diselesaikan di bulan Mei 2011.

Walau CAO mengakui komitmen dan tindakan yang diambil IFC sebagai tanggapan atas audit 2009 terhadap investasi Wilmar, tidak jelas bagi CAO apakah IFC memenuhi persyaratan Kebijakan Keberlanjutan dan ESRP sehubungan dengan masalah pengawasan rantai pasok seputar Delta-Wilmar.

⁸ IFC (2006) *Standar Kinerja 1*, alinea 6 & 13.

⁹ ESRP, v5., alinea 1.

¹⁰ *Kebijakan Keberlanjutan* (2006), alinea 26.

¹¹ *Laporan Status tentang Penerapan Kerangka Kerja Grup Bank Dunia & Strategi IFC untuk Keterlibatan di Sektor Minyak Kelapa Sawit* (September 2012). Tersedia di: <http://goo.gl/P04rb4>

5. Keputusan CAO

Keputusan tentang apakah CAO harus memulai sebuah penyelidikan kepatuhan perlu menimbang sejumlah faktor yang mencakup dampak lingkungan dan sosial potensial dari investasi, penilaian awal kinerja E&S IFC, serta pengkajian yang lebih umum tentang apakah ada pendapat yang menyokong nilai dari penyelidikan kepatuhan karena alasan yang terkait dengan proyek atau sistemis.

Aduan dalam kasus ini mengangkat keprihatinan nyata mengenai dampak lingkungan dan sosial perkebunan kelapa sawit Wilmar di Provinsi Jambi, Sumatera, Indonesia, dan menegaskan bahwa hal ini terkait dengan rantai pasok Delta-Wilmar.

Setelah CAO meninjau dokumentasi yang tersedia dan mengadakan diskusi awal dengan staf IFC, tidak jelas bagi CAO apakah IFC mengawasi investasinya di Delta-Wilmar sesuai dengan persyaratan E&S yang berlaku di masa setelah penerbitan laporan audit Juni 2009. Khususnya dan sehubungan dengan persoalan yang diangkat oleh aduan itu, tidak jelas bagi CAO:

- a. apakah IFC meyakinkan dirinya secara memadai bahwa COD lingkungan dan sosialnya dari pinjaman kepada Delta-Wilmar benar-benar dipenuhi sebelum pencairan di bulan Januari 2010; dan
- b. apakah IFC mengawasi investasi Delta-Wilmarnya sesuai dengan kebijakan, prosedur, dan standar E&S yang berlaku.

Fakta bahwa CAO telah menyelesaikan audit kepatuhan sehubungan dengan investasi IFC di Wilmar sudah dipertimbangkan di dalam konteks ini; begitu juga fakta bahwa investasi yang bersangkutan telah ditutup. Namun, dengan mengingat kerja kasus baru-baru ini, CAO menemukan bahwa pertanyaan seputar pencairan dan pengawasan yang terangkat oleh penilaian ini bermakna penting yang sistemis bagi IFC.

Maka, sesuai dengan Pedoman Operasionalnya, CAO akan mengembangkan Kerangka Acuan Kerja untuk suatu penyelidikan kepatuhan.

Annex 1: Overview of CAO - Wilmar Cases

Kasus CAO	Wilmar-1	Wilmar-2	Wilmar-3
Tanggal Pengaduan	Juli 2007	Desember 2008	November 2011
Status Kasus	Audit Kepatuhan diterbitkan (Juni 2009); Audit Kepatuhan ditutup (Maret 2013).	Ditutup setelah penyelesaian sengketa (Juni 2012).	Proses kepatuhan sedang berjalan.
Pengaju Aduan	Organisasi masyarakat sipil "atas nama kelompok terpengaruh minyak kelapa sawit yang mencakup penduduk pribumi dan petani kecil" yang diduga terdampak oleh perkebunan kelapa sawit Wilmar; di Sumatera dan Kalimantan.	Aduan dari kelompok masyarakat, yang diwakili oleh organisasi masyarakat sipil, yang diduga terdampak oleh perkebunan kelapa sawit Wilmar; khususnya di Sumatera dan Kalimantan.	Organisasi masyarakat sipil "atas nama kelompok terpengaruh minyak kelapa sawit yang mencakup penduduk pribumi dan petani kecil" yang diduga terdampak oleh perkebunan kelapa sawit Wilmar dan perkebunan yang darinya Wilmar memperoleh minyak kelapa sawit; khususnya di Sumatera dan Kalimantan.
Dugaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penggunaan ilegal kebakaran untuk membersihkan lahan. 2. Pembukaan hutan primer. 3. Pembukaan area dengan nilai konservasi tinggi. 4. Mengambil alih lahan adat penduduk pribumi tanpa proses yang tuntas. 5. Kelalaian melakukan konsultasi yang bebas, sebelumnya, dan mafhum dengan penduduk pribumi yang akan membawa kepada dukungan luas dari masyarakat. 6. Kelalaian berunding dengan masyarakat atau mematuhi kesepakatan rundingan. 7. Kelalaian membentuk area perkebunan kecil yang disepakati. 8. Pertikaian sosial yang memicu tindakan represif oleh perusahaan dan aparat keamanan. 9. Kelalaian melakukan atau menunggu persetujuan pengkajian dampak lingkungan yang diwajibkan secara hukum 10. Pembukaan hutan tropis dan gambut tanpa izin yang diperoleh secara sah. 	Serupa dengan Wilmar-1, dengan tambahan penyebutan sengketa lahan antara masyarakat dan sejumlah anak perusahaan Wilmar sebagai akibat dari ketidakpatuhan terhadap Standar Kinerja IFC 5 (Pembebasan Lahan).	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengenakan pemukiman masyarakat di Jambi (Sumatera) yang dipandang berlawanan dengan Standar Kinerja IFC dan dengan penggunaan langkah paksa. 2. Pelanggaran hak azasi manusia yang parah dan pengusiran paksa anggota masyarakat lokal oleh karyawan PTAP dan anggota Brigade Mobil Kepolisian Indonesia di Jambi, Sumatera. 3. Pembukaan dan penanaman perkebunan tanpa membayar ganti terhadap lahan dan harta benda lain yang terkena. 4. Masalah pembebasan lahan dan penyelesaian sengketa di anak perusahaan Wilmar lainnya. 5. Sengketa lahan yang tidak terselesaikan sehubungan dengan anak perusahaan Wilmar di Indonesia secara lebih umum.